KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PROGRAM BUMDES

Yulianus Nardin

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang
E-mail: nardinyulianus27@gmail.com

Abstrak: Masalah Kesenjangan yang merupakan kenyataan dalam pembangunan memerlukan pemecahan dengan pemihakan pada masyarakat melalui program Pemberdayaan, demikian peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam menyelesaikan kesenjangan ekonomi, keterbelakangan ini dapat di rumuskan dalam satu konsep kebijakan program pemberdayaan oleh pemerintah melalui Program BUMDes, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Potensi/keunggulan digerakkan oleh Pemerintah Desa. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu merupakan lokasi penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada Program BUMDes. Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu sesuai dengan program strategi pemberdayaan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada Proses pengembangan kelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini pertanian hydroponic mengalami kemacetan pada staf khusus pengelola, yang mengakibatkan pertanian hydroponic tidak terawat.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan payung hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa pasal 126, bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata ekonomi dan lingkungan Serta kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, perhatian secara khusus pemerintah diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pembangunan ekonomi tertera pada ayat 1 pemberdayaan masyarakat desa. Solekhan, Moch (2014:49). Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu memiliki potensi/keunggulan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Pemerintahan Desa Pesanggrahan bersama masyarakat melakukan kerja sama untuk mengelola potensi/keunggulan yang dimiliki desa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program BUMDes.

Tujuan pemberdayaan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung life 1995 dalam Suharto (2017:58). Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pihak ketiga di laksanakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUMDes, Badan kerja sama antar-desa, forum kerja sama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang di bentuk untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan pada umumnya. Prosedur yang di tetapkan pemerintah secara sub struktural dapat di tindak lanjuti oleh pemerintah daerah/kota kabupaten atas Undang-Undang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014. Tujuan penelitian ini adalah Untuk

mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program BUMDes, Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program BUMDes. Pemerintah desa mempunyai peran sentral dalam menopang perekonomian desa, daya jual desa dapat di kelola secara optimal sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial, dengan mengelola sumber daya yang dimaksud, selain di peruntukan bagi peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat desa Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Batu tentang Pedoman Kegunaan Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014.

Hakikat Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah bagian dari suatu kegiatan dan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Anggara (2014:232).

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Ismawan Priyono, 1996 dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:17) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari: Pengembangan sumber daya manusia, Pengembangan kelembagaan kelompok, Pemupukan modal masyarakat (swasta), Pengembangan usaha produktif, Penyediaan informasi tepat-guna.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara menyeluruh, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, dan pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode, Moleong (2012:06).peneliti mengambil tempat penelitian di desa pesanggrahan Jln. Suropati Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Teknik Pengambilan Sampel Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. dalam penelitian ini yang menjadi purposive sampling adalah kepala desa, sekretaris desa, ketua umum BUMDes, Pengelola BUM-Des, LPMD dan Warga/Masyarakat desa. Informan diperlukan adalah mereka yang mempunyai keterlibatan langsung dalam pemberdayaan masyarakat desa. Proses Analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, selanjutnya direduksi, penyajian, dan ditarik kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Pesanggrahan berada di wilayah Kecamatan Batu, Kota Batu. Desa perkotaan dengan ketinggian 900 s/d 1000 meter dari permukaan laut, curah hujan rata-rata per tahun antara 2000 s/d 3000 mm, dengan suhu rata-rata antara 24⁰C – 26⁰C, dari 4 (empat) kelurahan dan 4 (empat) desa yang berada di wilayah Kecamatan Batu. Yang terdiri dari 6 (enam) wilayah dusun antara lain : Dusun Toyomerto, Dusun Serbet Barat, Dusun Serbet Timur, Dusun Wunucari, Dusun Krajan/Pesanggrahan, Dusun Macari.

Kewilayahan

Dalam pembagian kewilayahan, Desa Pesanggrahan dibagi atas 6 (enam) wilayah dusun antara lain : Dusun Toyomerto, Dusun Serbet Barat, Dusun Serbet Timur, Dusun Wunucari, Dusun Krajan/Pesanggrahan, Dusun Macari

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDes

Pemerintah desa sebagai penyelenggara otonomi desa bermaksud sebagai pedoman dan penjabaran dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu yang ditentukan, serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa pesanggrahan. Maksud dan tujuan ini merupakan langkah yang menggerakkan pemerintah desa pesanggrahan untuk mengatur serta mengelola potensi desa melalui program BUMDes, kemudian dimandirikan secara struktur. Memberikan ruang yang cukup dan membawah perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayaan, sumber daya manusia, sumber daya alam dan potensi sumber Pendapatan yang ada dalam penyusunan perencanaan pembangunannya. Tentang Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dasar hukum ini dijadikan dalil penguat pemerintah desa untuk mengelola potensi desa berdasarkan standar yang telah ditetapkan di RKPDes. Berdasarkan rumusan masalah yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDes yang dianalisis dengan menggunakan lima program strategi pemberdayaan. Demikian dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep dasar program strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Ismawan Priyono 1996, untuk melihat apakah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam program BUMDes berjalan efektif ataupun belum. Ismawan Priyono, 1996 dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:17) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari Pengembangan sumber daya manusia, Pengembangan kelembagaan kelompok, Pemupukan modal masyarakat (swasta), Pengembangan usaha produktif, Penyediaan informasi tepat-guna, sebagaimana berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka. Dalam pengembangan sumber daya manusia BUMDes Pesanggrahan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat melalui unit BLK (Balai Latihan Kerja) rencana bidang sesuai dengan dokumen RPJM Pesanggrahan, Galeri batik dan Sablon yang terdiri dari prasarana pembangunan Fisik, dan pelatihan pertanian (hidroponik) yang menggunakan air dengan media paralon. pengembangan sumber daya manusia masyarakat diperdayakan secara mandiri yang kemudian pemerintah mendirikan BUMDes sebagai wadah pengelola untuk pengembangan sumber daya manusia di desa. Pemerintah desa mendirikan BUMDes dengan peraturan Desa Pesanggrahan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dengan berpedoman pada peraturan daerah. Dalam upaya menggerakkan perekonomian desa melalui program BUMDes merupakan tolak ukur dari sebuah peningkatan pertumbuhan pembangunan desa, memperdayakan masyarakat dan peningkatan terhadap ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi yang dimiliki desa, ekonomi desa ditunjangi dengan berbagai metode pendekatan yang kemudian digerakkan seluruhnya oleh pemerintah desa. Kemandirian desa dalam rangka otonomi desa memerlukan persiapan yang serius, kesiapan lembaga digerakan dan berperan aktif dalam memperdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Karena itu, peningkatan fungsi

kemandirian lembaga ekonomi desa berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan serta memperkuat perekonomian masyarakat dengan pemerintah desa sebagai pondasinya.

2. Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Pengembangan kelembagaan kelompok adalah upaya memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun kondisi eksternal. Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugasnya. Agar masyarakat miskin tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan pemerintah desa melakukan pengembangan kelembagaan kelompok yang dibagi dengan beberapa unit terselenggara yaitu kelompok khusus pengelola yaitu pertanian hidroponik, unit pengelola sabun susu, unit pengelola aset dan unit pengelola keuangan UPK. disimpulkan bahwa pengembangan kelembagaan kelompok yang dijalankan sesuai dengan unit terselenggara telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan, unit pertanian hidroponik, unit pengelolaan susu dan UPK adalah bagian dari pengembangan program BUMDes yang dibentuk sesuai dengan program pembinaanya, pendampingan dalam proses pemberian pelatihan dilibatkan secara permanen untuk keberlangsungan pengembangan kelompok, Proses pengembangan kelembagaan kelompok yang dibagi beberapa unit, masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini pertanian hidroponik mengalami kemacetan pada staf khusus pengelola, yang mengakibatkan pertanian hidroponik tidak terawat, sebagai dasar pengembangan pemberdayaan yang diperlukan adalah memperkuat pemupukan perawatan dengan cara pelatihan-pelatihan struktur sesuai standar prosedur, serta memberikan perawatan dengan konsep inovatif.

3. Pemupukan Modal Masyarakat

Peningkatan akses kedalam aset produksi bagi masyarakat yang masih dominan dalam ekonomi rakyat secara mendasar dan sesuai dengan tujuan membangun kemandirian masyarakat pedesaan, adalah membangun lembaga pendanaan perdesaan yang dimiliki, dikelola, dan hasilnya dinikmati oleh rakyat sendiri. Pemupukan modal adalah merupakan landasan dalam perubahan struktural yang tumbuh dan berkembang. Modal usaha tersebut adalah bagian dari hibah kepada masyarakat yang dipinjamkan kepada anggota masyarakat. Kelompok masyarakat yang mengelola modal usaha ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga dana di pedesaan, demikian Pemupukan modal masyarakat yang dikembangkan desa pesanggrahan bersumber dari APDes dan swasta yaitu CSR dana sosial dari perusahaan ASTRA untuk pengelolaan sabun susu. Dan pembagian modal diberikan BUMDes pada unit-unit pengelola, seperti unit pertanian hidroponik, unit pengelola sabun susu, unit pengelola aset dan unit pengelola keuangan UPK. Demikian setiap unit dapat mengatur dan mengelola modal yang ada dibawah kendali atau pemantauan BUMDes Pesanggrahan. Arah kebijakan keuangan desa, pemerintah desa memberikan modal kepada BUMDes untuk mengelola potensi desa sesuai program yang diselenggarakan. Modal yang diberikan pemerintah digolongkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat di dalamnya ada pengelolaan Potensi Desa oleh BUMdes. Modal ini kemudian dikembangkan oleh BUMdes sesuai dengan rancangan yang ditetapkan untuk mengelola potensi yang ada di desa. Serta keterlibatan swasta dalam memberikan modal untuk BUMDes Pesanggrahan sangat menguntungkan.

4. Pengembangan Usaha Produktif

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif, pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pengembangan usaha produktif dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan, demikian Dalam Pengembangan usaha

produktif masyarakat dituntut untuk diperdayakan berdasarkan keterampilan yang dimiliki, mengembangkan usaha masyarakat menjadi lebih produktif, sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa, Pengembangan Usaha Produktif yang diselenggarakan masyarakat desa pesanggrahan meliputi sabun susu, galeri sablon, dan oleh-oleh. Bagaimana usaha produktif ini dikembangkan secara bersama oleh masyarakat yang memiliki keterampilan khusus, selanjutnya BUMDes memberikan pelatihan-pelatihan khusus pada masyarakat sesuai bidang keterampilan yang ditetapkan. Pemberdayaan dijalankan berdasarkan keterampilan yang dimiliki masyarakat, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat produktif dalam meningkatkan keterampilan dan atau daya inovatif.

5. Penyediaan Informasi Tepat

Teknologi dan informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengembangkan usaha yang diselenggarakan masyarakat desa, karena itu perlu adanya ketersediaan teknologi dan informasi secara tepat guna yang kemudian dimanfaatkan secara optimal. Penyediaan informasi tepat guna dapat memanfaatkan media sosial, situs web pemerintah desa dalam proses marketing. Serta penyediaan informasi tepat guna pemerintah desa memanfaatkan media sosial sebagai propoganda marketing untuk mempublikasikan potensi desa yang dikelola, ketertarikan wisatawan lokal untuk mengunjung ke desa pesanggrahan digerakan melalui informasi media sosial online, demikian potensi desa yang diprogramkan BUMDes pesanggrahan dijadikan *ICON* wisata oleh pemerintah desa pesanggrahan.

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Program BUMDes

Implementasi adalah suatu kegiatan dan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan, Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2010:87).Pemerintah desa selaku penyelenggara otonomi desa telah menetapkan perdes tentang BUMDes. Badan usaha milik desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes adalah muncul sebagai kekuatan ekonomi baru dipedesaan. Lahirnya Peraturan Desa Pesanggrahan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dapat memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai penggerak ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa mendirikan BUMDes dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan daerah.

Dari hasil pembahasan yang suda dipaparkan maka dapat dipahami bahwa peran serta implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada sektor pengelolaan industri pariwisata. Desa pesanggrahan, kecamatan batu, kota batu tela berjalan maksimal sesuai dengan prinsip pengelolalanya, namun demikian masih ada kendala pada Proses pengembangan kelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini pertanian hydroponic mengalami kemacetan pada staf khusus pengelola, yang mengakibatkan pertanian hydroponic tidak terawat, juga tanggapan masyarakat atas adanya pengelolaan potensi desa bidang industri pariwisata berdampak baik, karena Masyarakat diberikan ruang oleh pemerintah desa dalam mengelola potensi desa secara bersama, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan peningkatan pendapatan asli desa melalui proses pemberdayaan sedikit meningkat, sebab dikelola dan dioptimalisasi melalui BUMDes.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang ditelusuri peneliti mengemukakan fakta yang terjadi dilapangan, yang pada tatanan empiriknya penelitian yang berjudul kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada Program BUMDes (Studi Pada Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu,

Kota Batu) dapat ditarik kesimpulannya yaitu Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada Program BUMDes. Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu sesuai dengan program strategi pemberdayaan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada Proses pengembangan kelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini pertanian hidroponik mengalami kemacetan pada staf khusus pengelola, yang mengakibatkan pertanian hidroponik tidak terawat. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Program BUMDes. Pemerintah desa selaku penyelenggara otonomi desa menetapkan perdes tentang BUMDes. Peraturan Desa Pesanggrahan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Demikian BUMDes sebagai penggerak ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Pesanggrahan

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta
- Moleong, J. Lekxi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggara Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun masyarakat memperdayakan rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Widodo, Joko. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative